

DAFTAR BACAAN

A. Buku

John Alder and Peter English, *Constitutional and Administrative Law*, London, Macmillan, 1989.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Liaw Yock Fang 1975:178.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidakarya Agung Jakarta, 1989.

Indria Fernida, *Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA): Pengungkapan Kebenaran atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian*, Asia Justice for Rights (AJAR) & KontraS, 2017.

Charles Harper, *Overcoming Impunity; Reconciliation in a Latin America Context*. Charles harper adalah director WCC dari 1973-1992 Human Right Resources Office for Latin America, dari interim director dari WCC's Commission of the Churches on International Affairs 1992-95.of dual Brazilian/USA nationality, he edited the book entitled the book entitled *Impunity : An Ethical Perspective. Six Case Studies from Latin America*. WCC Publications, 1996.

William Penn, dalam *Some Fruits of Solitude*, 1693.

Sri Lestari Wahyuningrum, ND, *BRA-KDP Program Final Assessment*, November 2007.

UNDP, *Access to Justice in Aceh : Making the Transition to Sustainable Peace and Development in Aceh*, (2007), 37, 59.

Paper Konsep *Reparasi Mendesak bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Kejahatan Berbasis Gender dalam Konflik Aceh*, oleh LBH APIK, RPUK, KontraS Aceh, PASKA, Balai Syura, Komnas Perempuan, dan ICTJ, n. d.

Hanif Nurcholis, *Teori dan praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

B. Skripsi/Tesis/Jurnal

Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Bahan Ceramah pada DIKLATPIM Tingkat I Angkatan XVII dalam Lembaga Administrasi Negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 30 Oktober 2008.

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari aspek historis dan yuridis*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 13 Juli 2013.

D. Djohari, *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2011.

Tri Putra Djaja Sakti, *Pemberian amnesti kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Akhmad Fauzie Hawaim Machrus, *Kepribadian Otoritarian dan Ideologi Politik (Studi Kualitatif Terhadap Fungsionaris dan Simpatisan Empat Partai Politik Di Surabaya)*, Journal, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, Juni 2003.

Yuswanto, *Otonomi Daerah dalam Konstitusi, Kuliah Otonomi Daerah*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Said Amir Arjomand, *Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics*, dalam *Journal International Sociology*, edisi March 2003 Vol 18 (1).

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.

Rizky Putra Zulkarnain, *Pengawasan Terhadap Peraturan yang Dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Khusus (Studi Kasus tentang Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Puji Yuulianto, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

M. Hassan Mulyadi, *Implementasi Perda Qanun Di Aceh Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

M. Hassan Mulyadi, *Implementasi Perda Qanun Di Aceh Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian*, Tesis, Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2017.

Wiratraman, Herlambang P. 2015. *Menunda Keadilan Sama Halnya Ketidakadilan*. Keterangan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, Perkara No. 075/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006; dan Wiratraman, H.P. et all. 2007, *Dampak dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memutuskan Pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Mekanisme Hukum dan Akses Keadilan Korban bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.*, Surabaya, Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga.

Yusdianto, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 3, 2015.

Monika Suhayati, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Negara Hukum Vol. 2, No. 2, 2011.

C. Website

Ari Yurino, *Pelanggaran HAM, Korban Dan Pemulihan*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, <https://referensi.elsam.or.id/2019/04/pelanggaran-ham-korban-dan-pemulihan/>, 29 April 2019.

Adi Condro Bawono, *Definisi Ad-hoc*, Klinik Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3810/ad-hoc/>, Justika Siar Publika, Jakarta, 7 Maret 2012.

Mahfud MD, *Mahfud MD Minta UU Pengadilan Tipikor direvisi*, www.mahfudmd.com.

Mengapa Aceh Berontak, Majalah Tempo, Edisi Khusus, Agustus 2003.

Nicholas Ongko, *Pemberontakan DI/TII Aceh*, https://www.academia.edu/28795750/Pemberontakan_DI_TII_pptx.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Mendorong Pembentukan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/00000000_Polivy-Brief_Mendorong-pembentukan-kembali-UU-KKR.pdf, Kertas Kerja KKR Masa Lalu Publikasi, 10 September 2011.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Kertas Kerja ELSAM, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sebagai Salah Satu Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh*, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Komisi-Kebenaran-dan-Rekonsiliasi_KKR_Sebagai-Salah-Satu-Agenda-Hak-Asasi-Manusia-di-Aceh.pdf.

Wiratraman, H.P. et all. 2020., *Merumuskan Kebijakan Negara dalam Rangka Menindaklanjuti Rekomendasi KKR Aceh Reparasi Korban dan Perubahan Kebijakan*, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2020/01/brief-kkr-aceh-20-jan-2020.pdf>, Police Brief, Jakarta, 23 Januari 2020, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Maidah Purwanti, *Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia*, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, Widyaiswara, Kementerian Hukum dan HAM.

Diana Kusumasari, *Hak Privasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d5605606b42e/hak-privasi/>, Kamis, 17 Februari 2011.

Fadhila Eka Ratnasari, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Nasib Kasus HAM di Peti Es Sejarah*, <https://www.matamatapolitik.com/komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-nasib-kasus-ham-di-peti-es-sejarah-original-in-depth/>, 17 November 2019.

KontraS, Seri II, *Aceh, damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/aceh-damai-dengan-keadilan.pdf>, Jakarta, 2006.

Indonesia Kecamatan Development Program at <http://www.worldbank.org/id/kdp>; World Bank, “*Aceh Conflict Monitoring Update*” (November 2006), 4.

Zulfirman, *Rapat Dengar Kesaksian*, <https://kkp.acehprov.go.id/rapat-dengar-kesaksian-rdk/>, 08 Juli 2019.

Ak, *Pernyataan Sikap Rapat Dengar Kesaksian KKR Aceh Tahun 2019*
“*Penghilangan Orang : Kembalikan Mereka, Jangan Terulang*”, <https://kkp.acehprov.go.id/ Pernyataan-sikap- Rapat-dengar-kesaksian- kkr- aceh-tahun-2019-penghilangan-orang-kembalikan-mereka-jangan-terulang/>, 18 November 2019.

Admin, *Pernyataan Akhir Rapat Dengar Kesaksian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Penghilangan Orang*, <https://kkp.acehprov.go.id/ Pernyataan-akhir- Rapat-dengar-kesaksian-komisi- kebenaran-dan-rekonsiliasi- aceh-penghilangan-orang/>, 20 November 2019.